TAJUK RENCANA

Menunggu DPR Putuskan Biaya Haji

KABAR gembira kembalinya kuota haji Indonesia seperti semula, 221.000 jemaah dan tidak adanya batasan usia jemaah yang akan berangkat, ternyata disusul dengan kabar menyedihkan. Sepulang dari Tanah Suci, Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas mengusulkan adanya kenaikan biaya yang harus ditanggung jemaah, yaitu sekitar Rp 69.193.733. Artinya, kalau setiap jemaah sudah mempunyai setoran awal Rp 25 juta,maka masih kurang sekitar Rp 44 juta.

Sebagaimana diketahui,dalam penyelenggaraan haji selama ini pembiayaannya terdiri BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), yaitu total biaya yang dibutuhkan setiap jemaah, dan Bipih atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji, yaitu biaya yang harus ditanggung setiap jemaah. Jadi, setiap jemaah tidak membayar sesuai biaya yang dibutuhkan. Sedang untuk menutupkan, diambilkan dari nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Nilai manfaat tersebut tidak hanya bersumber dari uang setoran awal Rp 25 juta dari setiap jemaah yang berangkat, tetapi juga dari setoran jemaah lain yang sudah masuk antrean daftar tunggu (*waiting list*) keberangkatan haji.

Setiap tahun sebenarnya BPIH selalu naik, antara lain akibat inflasi, nilai kurs, dan harga avtur pesawat. Sejalan dengan itu besaran nilai manfaat yang digunakan untuk menutup BPIH juga selalu berubah. Misalnya, tahun 2010 biaya haji yang dibutuhkan totalnya Rp 34,5 juta, Rp 30 juta (87%) dibebankan pada setiap jemaah (Bipih) dan 4,45 juta (13%) dari nilai manfaat. Selanjutnya, dana dari nilai manfaat selalu ditambah supaya biaya yang ditanggung jemaah tidak naik drastis. Tahun 2019, rasio antara Bipih dan Nilai Manfaat sudah mencapai angka seimbang 50 persen banding 50 persen. Begitu juga pada pemberangkatan haji tahun 2022 di mana total biaya haji dari Rp 70 jutaan menjadi Rp 90 jutaan.

Sedang untuk musim haji tahun 2023 ini Kemenag menginginkan rasio 70% ditanggung jemaah dan 30 % dari nilai manfaat. Alasannya cukup logis, agar pembiayaan haji berkeadilan dan berkelanjutan untuk semua antrian jemaah haji Indonesia.Artinya, nilai manfaat agar tidak cepat habis dan tidak hanya dinikmati jemaah yang berangkat tahun ini, tetapi yang berangkat di tahun-tahun mendatang.

Hanya saja kenyataannya, kebanyakan jemaah tidak memikir hitung-hitungan seperti di atas. Mereka hanya berpikir, pada masa pelunasan nanti berapa yang harus dibayar. Ketika muncul usulan total biaya yang harus ditanggung sekitar Rp 69 juta, banyak yang sudah merasa berat. Sebab uang Rp 44 juta tidak sedikit. Apalagi mayoritas jemaah dari kalangan menengah ke bawah dan untuk bisa berangkat haji mesti menabung cukup lama. Lebih-lebih kalau berangkat berdua (suami-istri), dibutuhkan Rp 88 juta.

Karena itu, kalau DPR RI menyetujui usulan tersebut, diprediksi akan banyak calon haji yang tidak mampu melakukan pelunasan alias mengundurkan diri. Ketika akan digantikan oleh pemilik nomor porsi berikutnya, juga belum tentu siap dengan biaya sebesar itu. Kalau saat pemberangkatan haji nanti banyak kursi pesawat kosong, maka akan terjadi kemubadziran, karena pada dasarnya *seat* tersebut sebenarnya sudah dibayar.

Karena itu, mumpung belum diketok palu, para wakil rakyat di Senayan hendaknya bisa berpikir jernih dan bersikap bijak untuk mencari solusi terbaik. Misalnya, besaran Bipih tidak langsung 70%, tetapi 55% dulu dan setiap tahun secara bertahap dinaikkan.Atau ada efisiensi pada hal-hal tertentu. Alangkah sedihnya mereka yang sudah lama ingin berangkat haji tetapi tertunda lagi. ❑-d

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik

Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Membuang Sampah di Jalanan

SEBAGAI pengemudi taksi saya biasa ke luar rumah pagi hari, pukul 06.00. Kata orang tua, rejeki itu hadirnya pagi hari. Sehingga selalu saya berusaha berangkat pagi, meski nanti sekitar pukul 08.00 kalau sepi orderan saya pulang untuk sarapan di rumah.

Beberapa hari yang lalu saya melaju lewat Jembatan Janti dengan agak santai karena sedang tidak ada yang dikejar dan lagi masih cukup pagi, pukul 06.00. Yang membuat saya kaget, di simpangan jembatan yang membagi jembatan dimana yang satu ke arah Solo dan yang lain ke arah Yogya itu, tiba-tiba ada motor berhenti sejenak dan meletakkan satu kresek hitam, dan sangat mungkin berisi sampah. Diletakkan dan disandarkan di pemisah jalan dan langsung kencang pergi.

Saya termangu. Jika benar sampah, mengapa dibuang di jalanan? Apakah dia tidak melewati tempat pembuangan sampah atau tong sampah di pinggir jalan? Sungguh terlalu perilakunya. ❑-d

**) Gatot A, Wonocatur Banguntapan*

Waspada Potensi Bencana Pesisir di Yogyakarta

Bachtiar W Mutaqin

YOGYAKARTA sebagai wilayah dengan potensi bencana pesisir yang tinggi, harus selalu waspada dan siap menghadapi ancaman bencana yang datang. Faktor eksternal seperti perubahan iklim dan kondisi cuaca yang tidak menentu, serta pembangunan yang tidak sesuai standar di wilayah pesisir, dapat memperburuk potensi bahaya bencana pesisir di Yogyakarta.

Seperti yang kita ketahui, Yogyakarta mempunyai garis pantai yang panjang dengan lokasi wisata pantai yang sangat populer. Di sisi lain, ia berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan memiliki topografi yang cenderung datar, sehingga rawan terhadap ancaman banjir pasang, erosi pantai, gelombang tinggi, maupun tsunami.

Seperti yang terjadi pada 17 Juli 2006, Yogyakarta pernah terdampak tsunami yang dipicu oleh gempa di baratdaya Pangandaran. Kita juga tidak dapat melewatkan peristiwa-peristiwa bencana pesisir yang terjadi di wilayah lain di Indonesia. Seperti di Aceh pada tahun 2004, tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan wilayah pesisir.

'Lampu Hijau'

Tsunami memang belum dapat diprediksi dengan tepat, kapan dan di mana ia akan terjadi. Berbeda dengan fenomena erosi pantai dan gelombang pasang yang dapat dikatakan telah terjadi secara rutin di Yogyakarta tiap tahunnya. Tahun 2022, Yogyakarta juga terdampak erosi pantai dan gelombang tinggi yang sebenarnya telah diprediksi dengan baik oleh BMKG. Bencana ini mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekonomi yang cukup parah di wilayah pesisir Yogyakarta.

Keputusan pemerintah Indonesia untuk mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentu menjadi 'lampu hijau' bagi pelaku pariwisata pantai di Yogyakarta untuk kembali mendapatkan penghasilan seperti sebelum pandemi. Pantai-pantai di Yogyakarta akan kembali ramai dengan wisatawan dan masyarakat lokal. Kerumunan massa dalam jumlah banyak di lokasi rawan bencana tentu dapat meningkatkan risiko apabila terjadi bencana. Oleh karena itu, pemerintah Yogyakarta harus memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan kawasan pesisir dan pencegahan bencana yang lebih baik.

KR-JOKO SANTOSO

Untuk melindungi wisatawan dan penyedia jasa wisata serta mengurangi risiko, pemerintah Yogyakarta dapat dengan tegas menerapkan peraturan yang telah mereka buat. Salah satu contohnya adalah Perda DIY No. 5 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2019-2039. Dalam perda tersebut telah dijelaskan tentang kawasan perlindungan, salah satunya berupa sempadan pantai.

Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam perda ditetapkan dengan lebar paling sedikit 100 meter untuk Gunungkidul dan paling sedikit 200 meter untuk Bantul dan Kulon Progo, yang dihitung dari titik pasang tertinggi kearah darat. Tujuannya tentu saja untuk melindungi masyarakat ketika fenomena gelombang tinggi maupun erosi pantai terjadi di wilayah tersebut.

Beban Lingkungan

Meskipun demikian, hal ini juga tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, masyarakat juga harus berperan aktif dalam mencegah dan mengatasi bencana pesisir dengan cara seperti tidak membangun di area rawan bencana, menjaga lingkungan, serta selalu siap menghadapi bencana yang mungkin terjadi. Pemukiman yang dibangun di wilayah pantai yang rawan bencana atau dalam wilayah sempadan pantai tentu akan menambah beban lingkungan dan meningkatkan risiko kerusakan yang lebih besar saat bencana terjadi.

Pemerintah dan masyarakat Yogyakarta harus segera mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi potensi bahaya bencana pesisir ini. Salah satu caranya adalah dengan melakukan rencana pengelolaan wilayah pesisir yang tepat dan memastikan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan di wilayah tersebut sesuai dengan standar keamanan bencana. Bencana pesisir bukanlah hal yang bisa diabaikan, kita harus selalu waspada dan siap menghadapi bencana agar dapat meminimalisir kerugian dan melindungi masyarakat dari dampak yang merugikan. ❑-d

) **Dr Bachtiar W Mutaqin, Dosen Fakultas Geografi UGM*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Gerak LPTK di Era VUCA

Sudaryanto

MUSYAWARAH Nasional (Munas) ke-V Ikatan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Ikaprobsi) digelar 20-21 Januari lalu di Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ), Cirebon. Dalam acara dihelat seminar bertajuk Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Era VUCA. Di sini, muncul pertanyaan-pertanyaan : apa yang dimaksud dengan VUCA? Bagaimana pengelola PT khususnya LPTK dalam menghadapi era VUCA?

Sejumlah referensi menyebutkan, VUCA adalah akronim untuk *Volatility, Uncertainty, Complexity* dan *Ambiguity*. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *gejolak, tidak pasti, kompleks* dan *ambigu*. Istilah ini berasal dari US Army War College untuk menggambarkan situasi di Perang Dingin pada era 1990-an. Setelah krisis pandemi Covid-19, membuat era VUCA berdampak luas terhadap banyak pihak, termasuk perguruan tinggi (PT).

Empat Trik

Era VUCA merupakan era ketidakpastian. Kini, semua PT, khususnya Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK), akan menghadapi datangnya era VUCA. Hemat penulis, ada empat trik yang perlu dilakukan pengelola LPTK. Pertama, memilih pemimpin yang tepat. Di lingkungan PT, pemimpin yang dimaksud ialah Rektor, Dekan, dan Ketua Jurusan/Departemen/Program Studi. Ketiganya harus memiliki kemampuan manajerial dan adaptif yang baik.

Kedua, memahami kemampuan bekerja dalam tim. Para pengelola dan dosen LPTK perlu memiliki kemampuan bekerja dalam tim. Contohnya, dalam menyambut Asesmen Lapangan (AL) Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (Lamdik), semua dosen proaktif dalam mempersiapkan data dan informasi yang tertuang pada Laporan Evaluasi Diri (LED). Tanpa proaktif dosen, data dan informasi pada LED diyakini kurang optimal.

Ketiga, melakukan transformasi digital. Para pengelola dan dosen LPTK perlu memiliki kemampuan adaptasi digital yang baik. Sebagai contoh, promosi fakultas dan jurusan/departemen/program studi melalui media sosial, yaitu Instagram, TikTok, dan Twitter. Selain itu, model perkuliahan bersifat bauran (*blended*) dan tugas perkuliahan bersifat proyek. Dosen dan mahasiswa dapat berinteraksi secara daring melalui Google Meet, Zoom, Live IG.

Keempat, melaksanakan kursus/pelatihan. Para dosen LPTK dapat mengikuti kursus/pelatihan secara rutin dan berkelanjutan. Misalnya, pelatihan analisis Capaian Pembelajaran (CPL) dalam kurikulum Outcome Based Education (OBE). Berkat pelatihan itu, para dosen dapat mengidentifikasi CPL yang telah dan belum dikuasai oleh mahasiswa. Selain itu, perlu juga pelatihan penggunaan *e-learning* bagi dosen dan mahasiswa per semester.

Empat trik di atas diyakini dapat membantu gerak pengelola LPTK dalam menghadapi era VUCA. Kita yakin, pemimpin yang tepat, kemampuan bekerja dalam tim yang baik, transformasi digital yang profesional, dan pelatihan yang berkelanjutan, akan menciptakan pengelola dan dosen LPTK adaptif di era VUCA. Dengan begitu, gerak LPTK tetap lincah dalam kondisi apapun, termasuk saat prapandemi, pandemi, dan pascapandemi.

Kunci Penting

Dalam menghadapi era VUCA, dua kunci penting perlu dimiliki pengelola dan dosen LPTK, yaitu kemampuan adaptif dan inovatif. Kemampuan adaptif mendorong pengelola dan dosen LPTK beradaptasi dengan multizaman dan multigenerasi. Saat mengajar mahasiswa generasi Z (gen Z), dosen harus mendesain model perkuliahan ramah digital dan bersifat proyek. Hal itu dikarenakan gen Z menyukai dunia digital dan bekerja proyektif.

Kemampuan inovatif mendorong pengelola dan dosen LPTK memiliki terobosan atau hal-hal baru. Di era VUCA, dosen LPTK dapat berkolaborasi dengan koleganya atau mahasiswanya dalam darma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bahkan, pengelola dan dosen LPTK dapat bermitra dengan pengelola Musyawarah Guru Mata Pelajaran tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

) **Sudaryanto MPd, Dosen PBSI FKIP UAD, Mahasiswa S-3 UNY, Pengurus Adobsi Pusat 2019-2024*

Pojok KR

Telusuri dugaan permainan mafia beras!
-- Perintah yang tak boleh dibantah.
***
Sejumlah jalan perlu rekayasa lalulintas.
-- Kendaraan kian banyak,jalan ramai.
***
Booster dosis kedua bisa segera diakses.
- Meski tidak pandemi, tetap jaga diri.

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd, Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.